



**LOMBA KARYA TULIS BANK INDONESIA
CAMPUS KNOWLEDGE COMPETITION 2018
(PENGARUH TEKNOLOGI TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI)**

DISUSUN OLEH :

IHSAN MULIA SIREGAR : 1640200160

INDRA SAPUTRA : 1640200094

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Abstrak	2
BAB I Pendahuluan	
Latar Belakang	3
Rumusan Masalah	4
Tujuan Penulisan.....	4
Manfaat Penulisan.....	4
BAB II Pembahasan	
Pengertian Teknologi	5
Teknologi sebagai Buatan Manusia	6
Teknologi Sebagai Kegiatan Manusia	8
Teknologi Sebagai Kumpulan Pengetahuan	8
Teknologi Sebagai Kebulatan Sistem	10
Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia.....	16
Tahap-Tahap Pertumbuhan Ekonomi	18
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia.....	20
BAB III Penutup	
Simpulan	44

DAFTAR TABEL

Tabel Saldo APBN	29
Perkembangan Inflasi Dan Jumlah Uang Yang Beredar.....	30
Data Ekonomi Makro	40
PDB Per sector atas harga konstan (Milyar)	41
Realisasi Pertumbuhan PDB Rii	42

DAFTAR LAMPIRAN

Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah

Lembar Pengesahan

Kartu Tanda Mahasiswa

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua ke jalan kebenaran yang diridhoi Allah SWT.

Maksud kami membuat karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi persyaratan-persyaratan kompetisi karya ilmiah yang diadakan oleh Bank Indonesia. Pada pembuatan karya ilmiah ini kami memperoleh banyak informasi dari berbagai buku. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini sangat jauh dari ketidak sempurnaan, untuk itu kami sangat mengharapkan kritik yang bersifat membangun guna kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhir kata kami mengucapkan terimakasih dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Padangsidempuan, 31 Oktober 2018

Penulis

PENGARUH TEKNOLOGI TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI

Abstract

This paper discusses high technology development failures in Indonesia based on literature reviews. The paper describes that the high technology development pitfalls have made the technologies become inappropriate technology for Indonesia since they do not reflect the need and resources of the country. This paper also analyzes that there are several variables that Indonesia has not been successfully exporting products based on technology development as competitive advantages. Finally, this paper proposes appropriate technology to support economic development based local resources and level of technology capabilities of a country.

Keywords : *high technology, government policies, economic development, local resources, appropriate technology.*

Abstrak

Artikel ini membahas kegagalan perkembangan teknologi tinggi di Indonesia melalui penelusuran pustaka. Studi ini memperlihatkan bahwa kegagalan perkembangan teknologi (tingkat) tinggi menjadikan teknologi tersebut tidak sesuai bagi Indonesia karena tidak mencerminkan kebutuhan dan sumber daya negeri ini. Tulisan ini juga menganalisis beberapa variabel yang menyebabkan Indonesia tidak berhasil mengeksport produk hasil teknologi tinggi dan gagal menjadikannya sebagai keunggulan kompetitif. Akhirnya, studi ini mengajukan usulan teknologi yang sesuai yang mendukung perkembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan sesuai dengan tingkat kapabilitas teknologi negeri ini.

Kata Kunci : teknologi tinggi, kebijakan pemerintah, perkembangan ekonomi sumber daya lokal, teknologi tepat-suai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa penelitian empiris membuktikan bahwa pengembangan teknologi telah memberikan kontribusi secara signifikan terhadap industrialisasi yang memicu pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Para peneliti sepakat bahwa pengembangan teknologi pada level makro mendorong pembangunan ekonomi dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Pada era global diprediksikan bahwa kemajuan teknologi akan memberikan kontribusi lebih dari 65 persen dalam pembangunan ekonomi dunia (Subranian, 1997).

Pada level mikro, kemajuan teknologi memainkan peran yang sangat berarti dalam perubahan struktur industri dan persaingan global. Menurut Sharif (1994), untuk dapat memenangkan persaingan di pasar global, setiap bisnis dituntut untuk mengelola teknologi dalam menciptakan keunggulan bersaing (*competitive advantages*). Kesuksesan bisnis dalam memenangkan persaingan sangat ditentukan oleh penciptaan *competitive advantages* yang berbasis pada pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi tersebut dibutuhkan pada setiap proses transformasi dari sejumlah input untuk menghasilkan output yang dapat memberikan nilai tambah (*added value*) pada setiap tahapan proses transformasi (Soehoed, 1998).

Dengan demikian, pengembangan teknologi sangat dibutuhkan, baik untuk mendorong pembangunan ekonomi bagi suatu negara, maupun untuk menciptakan keunggulan bersaing bagi entitas bisnis. Oleh karena itu, setiap negara dan bisnis dituntut untuk senantiasa mengembangkan teknologi secara berkelanjutan yang merupakan kebutuhan yang tidak terelakan pada era global (Radhi, 2005).

Dalam pengembangan teknologi, setiap negara dan bisnis dihadapkan pada dua pilihan. Pertama mengembangkan teknologi melalui proses *invention and innovation*. Kedua, mengembangkan teknologi melalui proses alih teknologi. Hampir tidak ada suatu negara dan bisnis yang mampu memenuhi semua jenis

teknologi yang dibutuhkan. Dalam menghadapi kondisi tersebut, suatu negara atau bisnis dapat menerapkan strategi teknologi yang disebut *make-some-and-buy-some strategy*. Penerapan strategi *make-some* dilakukan dengan pengembangan teknologi baru melalui R&D, sedangkan strategi *buy-some* diterapkan melalui proses alih teknologi (Ramanathan, 1994).

Selain itu, suatu negara atau bisnis juga dituntut untuk menentukan pilihan secara pragmatis berkaitan dengan jenis dan level teknologi yang harus dikembangkan agar memenuhi kriteria *appropriate technology*. Pilihan *appropriate technology* harus didasarkan atas beberapa faktor yang mendukung, di antaranya: kebutuhan teknologi yang sesuai dengan pengembangan industri, ketersediaan *technology infrastructure*, ketersediaan SDM yang mempunyai kemampuan teknologi (*technological capabilities*) dan faktor-faktor lingkungan yang mendukung (Ramanathan, 1994).

B. Rumusan Masalah

1. Apa itu teknologi ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ?
3. Bagaimana pengaruh teknologi terhadap perkembangan ekonomi ?

C. Tujuan Penulisan

1. Agar pembaca dapat mengetahui yang dimaksud dengan teknologi secara luas.
2. Agar pembaca dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi perekonomian.
3. Agar pembaca dapat menggunakan teknologi ke arah yang positif untuk perkembangan ekonomi.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan karya ilmiah ini bagi penulis adalah penulis dapat mencurahkan pengetahuannya tentang perkembangan ekonomi yang dipengaruhi teknologi dan penulis juga dapat mengajak masyarakat untuk menggunakan teknologi dengan baik untuk perkembangan perekonomian, sedangkan bagi pihak bank indonesia agar seluruh pegawai yang ada di bank tersebut dapat meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan perkembangan perekonomian.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Teknologi

Teknologi bagi kita merupakan pengetahuan terhadap penggunaan alat dan kerajinan, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kemampuan untuk mengontrol dan beradaptasi dengan lingkungan alamnya. Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani *technología* (τεχνολογία) - *TECHNE* (τέχνη), 'kerajinan' dan *-Logia* (-λογία), studi tentang sesuatu, atau cabang pengetahuan dari suatu disiplin. Teknologi juga dapat diartikan benda-benda yang berguna bagi manusia, seperti mesin, tetapi dapat juga mencakup hal yang lebih luas, termasuk sistem, metode organisasi, dan teknik. Istilah ini dapat diterapkan secara umum atau spesifik: contoh-contoh mencakup "teknologi konstruksi", "teknologi medis", atau "state-of-the-art teknologi".

Kita menggunakan teknologi dimulai dengan konversi sumber daya alam menjadi peralatan sederhana. Penemuan yang prasejarah kemampuan untuk mengendalikan api sehingga dapat mengolah makanan dan penemuan roda membantu manusia dalam perjalanan di dalam dan mengendalikan lingkungan mereka. Perkembangan teknologi terbaru termasuk mesin cetak, telepon, dan internet mengatasi hambatan fisik untuk komunikasi dan memungkinkan manusia untuk berinteraksi dengan bebas pada skala global atau luas. Namun, tidak semua teknologi ini telah digunakan untuk tujuan damai, pengembangan senjata yang semakin meningkat kekuatan destruktif telah berkembang sepanjang sejarah, dari klub untuk senjata nuklir.

Teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan sekitarnya dalam beberapa cara. Dalam masyarakat, teknologi telah membantu mengembangkan ekonomi yang lebih maju (termasuk ekonomi global saat ini). Tetapi banyak proses-proses teknologi juga menghasilkan produk yang tidak diinginkan atau mengakibatkan sesuatu hal, contohnya polusi, dan menguras sumber daya alam, dengan merusak bumi dan lingkungannya. Berbagai implementasi teknologi mempengaruhi nilai-nilai masyarakat dan teknologi baru sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan

etika baru. Contohnya meliputi munculnya gagasan tentang efisiensi dalam hal produktivitas manusia, istilah yang awalnya hanya berlaku bagi mesin, dan tantangan dari norma-norma tradisional.

Perdebatan filosofis telah muncul di masa kini dan masa depan menggunakan teknologi dalam masyarakat, dengan teknologi ketidaksepakatan mengenai apakah memperbaiki kondisi manusia atau memburuk itu. Neo-Luddism, anarko-primitivisme, dan gerakan-gerakan serupa mengkritik pervasiveness teknologi dalam dunia modern, opining bahwa itu merugikan lingkungan dan mengasingkan rakyat; pendukung ideologi seperti transhumanism dan techno-progresivisme melihat kemajuan teknologi terus bermanfaat untuk masyarakat dan kondisi manusia. Memang, sampai saat ini, diyakini bahwa perkembangan teknologi dibatasi hanya untuk manusia, tetapi penelitian ilmiah baru-baru ini menunjukkan bahwa primata lain dan masyarakat lumba-lumba tertentu telah mengembangkan alat yang sederhana dan belajar untuk menyampaikan pengetahuan mereka kepada generasi yang lain.

The Merriam-Webster menawarkan definisi dari istilah: "aplikasi praktis dari pengetahuan khususnya di daerah tertentu" dan "kemampuan yang diberikan oleh aplikasi praktis dari pengetahuan". Ursula Franklin, di 1989 "Real World of Teknologi "kuliah, memberi definisi lain dari konsep itu adalah" praktik, cara kita melakukan hal-hal di sini ". Istilah ini sering digunakan untuk menyiratkan bidang tertentu teknologi, atau untuk mengacu pada teknologi tinggi atau hanya konsumen elektronik, daripada teknologi secara keseluruhan. Bernard Stiegler, di Teknik dan Time, 1, mendefinisikan teknologi dalam dua cara: sebagai "pengejaran kehidupan dengan cara selain hidup", dan sebagai "yang diselenggarakan materi anorganik."

B. Teknologi sebagai Barang Buatan Manusia

Pengertian teknologi yang tertua, sangat sederhana, dan paling umum dikenal orang ialah sebagai barang buatan dari manusia. Mengapa manusia sejak zaman yang amat kuno perlu membikin berbagai barang buatan seperti kapak, palu, pengungkit, perahu, dan kereta? Jawabannya yang paling masuk akal adalah karena manusia merupakan suatu makhluk yang amat rapuh jasmaninya.

Menurut Lord Ritchie-Calder, dari masa yang tertua dan mulai dengan alat-alat yang paling sederhana, setiap penemuan dan penciptaan berdasarkan pada kenyataan bahwa manusia bukan hanya suatu makhluk perseptual melainkan juga suatu makhluk konseptual yang mampu mengamati, mengingat, dan menjajarkan gambaran angan-angan. Ia dapat membuat suatu perancangan mental, suatu khayalan tekno-puitis, bahkan bilamana sarana untuk senyatanya membuatnya tidak tersedia.

Menurut sejarahnya, ada dua titik waktu yang sangat penting dalam perkembangan teknologi menurut A. Gehlen (*Man in the Age of Technology*), yaitu:

1. Revolusi neolitik: mulai titik waktu ini manusia beralih dari hidup mengembara dan berburu ke keadaan hidup menetap dengan mengembangkan pertanian dan pemeliharaan hewan.
2. Revolusi industri: berkembangnya kebudayaan mesin yang memenuhi kebutuhan manusia dan mengubah tatanan hidupnya.

Teknologi sebagai barang buatan manusia memiliki tiga ragam dasar yang sekaligus menunjukkan perkembangan historis yang berlainan. Hal ini adalah pendapat dari seorang ahli yaitu Ladislav Tondl. Ragam dasar itu adalah:

1. Alat

Suatu benda yang bergerak semata-mata berdasarkan tenaga dari otot manusia. Pada umumnya manusialah yang membimbing dan mengendalikan alat-alat, dengan demikian manusia jugalah yang menjadi sumber informasi.

2. Mesin

Sesuatu sistem peralatan yang tidak menggunakan tenaga manusia, melainkan sumber- sumber tenaga di luar manusia, tetapi masih tetap memerlukan manusia untuk membimbing dan mengendalikannya.

3. Automaton

Perlengkapan teknologi yang paling tinggi ragamnya dan paling canggih. Perlengkapan ini (berdasarkan asas sibernetika yang

menggantikan fungsi pengendalian : manusiawi) mampu membuat keputusan dan mengatur sendiri.

C. Teknologi sebagai Kegiatan Manusia

Pengertian teknologi sebagai barang buatan kurang lengkap dan terlampau sempit. Barang buatan hanyalah suatu hasil akhir dari sebuah proses atau rangkaian kegiatan yang telah berlangsung sebelumnya. Oleh karena itu, pembahasan tentang pengertian teknologi harus menjelaskan kegiatan apa atau bagaimana yang telah terjadi sehingga menghasilkan berbagai barang buatan dari manusia itu.

Kegiatan manusia yang termasuk pengertian teknologi pada pokoknya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu membuat dan menggunakan. Membuat adalah kegiatan merancang dan menciptakan sesuatu barang buatan, sedang menggunakan adalah melakukan sesuatu kegiatan sesuai dengan fungsi suatu barang buatan yang telah dibuat. Sebagai contoh misalnya pembuatan perahu pada zaman dahulu, orang harus terlebih dahulu membuat kapak, palu, gergaji, dan alat pengukur. Kemudian barulah orang membuat perahu dengan menggunakan alat-alat itu. Jadi, dalam pembuatan suatu perahu yang senyatanya dilakukan dua jenis kegiatan membuat dan menggunakan. Dalam zaman modern, sekarang, kegiatan menggunakan berbagai peralatan, mesin, dan perlengkapan lainnya dalam pabrik untuk memproduksi (membuat) sesuatu barang buatan tampak lebih menonjol. Kedua kegiatan membuat dan kegiatan menggunakan itu sebagai teknologi harus dibedakan.

Dengandemikian, jelaslah kini apa yang dimaksud dengan teknologi sebagai kegiatan manusia. Tetapi tidak setiap kegiatan manusia adalah teknologi, melainkan hanyalah kegiatan yang mempunyai dua ciri pokok, yaitu efisien dan memiliki tujuan tertentu.

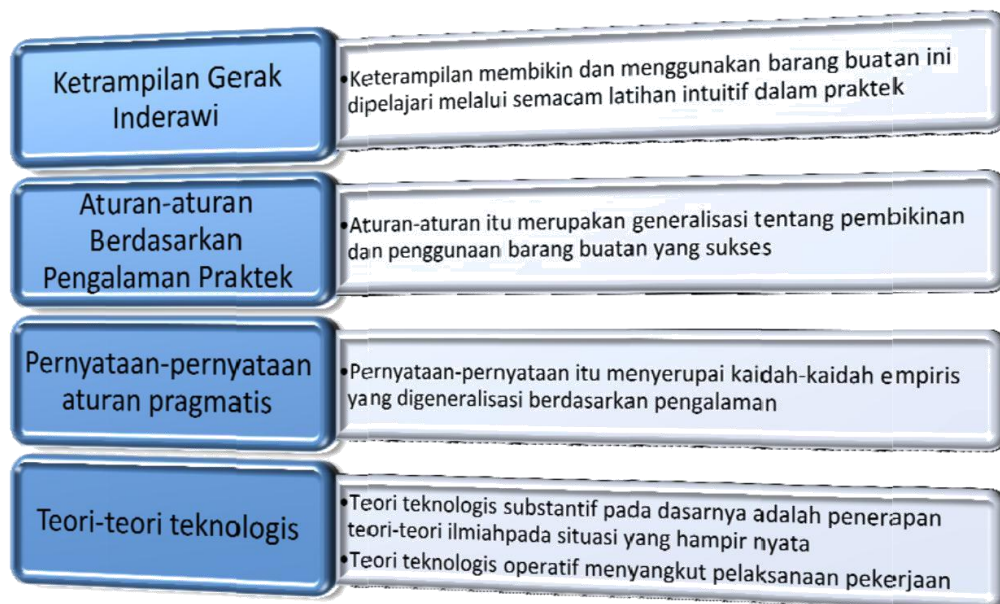
D. Teknologi sebagai Kumpulan Pengetahuan

Analisis yang lebih mendalam lagi terhadap teknologi sebagai kegiatan manusia yang secara sistematis langkah demi langkah dilakukan untuk mencapai

sesuatu tujuan tertentu secara efisien sampai pada faktor pengetahuan yang mendasari kegiatan itu. Pengetahuan ini harus dipelajari oleh manusia baik dari pengalaman sendiri maupun dari sumber-sumber lain untuk dapat melakukan kegiatan yang merupakan teknologi.

Seorang ahli Tom Burns mengartikan teknologi sebagai kumpulan pengetahuan, tetapi pengetahuan itu dibedakan menjadi dua kelompok, yakni pengetahuan yang masih terdapat pada bangsa yang terbelakang atau kurun masa sebelum industrialisasi zaman modern dan pengetahuan yang telah bersangkut paut dengan masyarakat-masyarakat industri. Atau dapat dikatakan, pengertian teknologi sebagai kumpulan pengetahuan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengetahuan yang masih bersifat tradisional sebelum terjadinya industrialisasi dan pengetahuan yang telah bercorak modern dalam masyarakat industri untuk produksi berbagai barang dan jasa.

Menurut Mario Bunge dalam "Toward a Philosophy of Technology", dapat dijelaskan melalui gambar berikut



E. Teknologi sebagai Kebulatan Sistem

Peter Drucker berpendapat bahwa teknologi harus dianggap sebagai suatu sistem, yaitu suatu kumpulan dan satuan-satuan dan kegiatan- kegiatan yang saling berkaitan dan saling berko munikasi. ("*Work and Tools*", *Technology and Culture*). Sampai pada permulaan abad XX ini, istilah teknologi telah dipakai secara umum dan merangkum suatu rangkaian sarana, proses, dan ide disampingnya alat-alat dan mesin-mesin.

Teknologi bukan saja dapat dipandang sebagai suatu sistem, melainkan teknologi memang sebuah sistem nyata (real system). Untuk pengertian sistem dapatlah diikuti pendapat von Bertalanffy yang merum uskannya sebagai suatu himpunan unsur-unsur yang dalam keadaan saling berhubungan satu samalain dan dengan lingkungan sekeliling, sedang real sistem ialah suatu entitas yang: diketahui dengan atau disimpulkan dari pengamatan dan ada secara bebas dari pengamat yang bersangkutan.

Teknologi adalah sebuah sistem, yakni suatu kebulatan terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain maupun dengan lingkungan sekelilingnya. Sistem apa atau yang bagaimana telah terjawab dengan sistem keterampilan praktis, atau secara lebih umum suatu sistem penentuan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan konsep efesiensi.

F. Ekspor Komoditas Eksploitasi

Kegagalan PT DI dan PT Timor tersebut dapat dijadikan sebagai indikator bahwa pengembangan *high technology* bukanlah *appropriate technilogy* bagi Indonesia. Selain kegagalan pengem-bangan teknologi pada kedua industri tersebut, pemerintah Indonesia tidak pernah secara serius dan terus menerus untuk mengembangkan teknologi yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria *appropriate technology*. Indikasinya, hampir semua komoditi ekspor Indonesia tidak berbasis pada teknologi, melainkan berbasis pada eksploitasi. Di tengah membanjirnya komoditi impor yang ber-basis pada teknologi di pasar Indonesia, semua produk ekspor Indonesia masih berbasis pada komoditi eksploitasi.

Kemampuan Indonesia untuk meng-ekspor tekstil salah satunya ditopang oleh eksploitasi terhadap buruh yang mene-tapkan upah minimum regional (UMR) relatif lebih rendah dibanding upah buruh di negara lain. Hal yang sama terjadi dalam mengekspor plywood yang dilakukan dengan mengeksploitasi secara besar-besaran terhadap hasil hutan. Yang paling ironis adalah kemampuan Indo-nesia untuk mengeskpor tenaga kerja indonesia (TKI) ke berbagai negara yang dilakukan dengan mengeksploitasi pen-duduk miskin yang tidak punya pilihan bekerja di bidang lain.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ekspor komoditi eksploitasi tersebut telah memberikan nilai tambah dan aliran devisa bagi Indonesia. Namun, nilai tambah komoditi berbasis eksploitasi jauh lebih kecil dibanding nilai tambah komoditi berbasis teknologi. Selain itu, kemampuan bersaing komoditi ekspor berbasis eksploitasi tidak dapat diperta-hankan dalam jangka panjang, karena komoditi tersebut tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*) dan sangat rentan (*fragile*) terhadap berbagai perubahan.

Volume ekspor tekstil Indonesia di pasar USA menurun drastis pada saat China dan Vietnam mengekspor tekstil di pasar yang sama dengan harga lebih murah, lantaran Cina dan Vietnam dapat menetapkan upah buruh lebih rendah daripada upah buruh di Indonesia. Penu-runan volume ekspor produk plywood juga akan terjadi pada saat hasil hutan Indonesia sudah habis sehingga tidak dapat dieksplotasi lagi untuk meng-hasilkan produk ekspor. Sementara ekspor TKI, yang sebagian besar terdiri dari tenaga kerja wanita (TKW) yang berprofesi sebagai pembantu rumah tang-ga, menimbulkan berbagai permasalahan serius lainnya, seperti perlakuan semena-mena, penganiayaan dan pemerkosaan terhadap TKW.

Paling tidak ada tiga variabel yang menyebabkan Indonesia hingga sekarang masih belum mampu mengekspor komo-diti berbasis teknologi sehingga terpaksa masih harus mengekspor komoditi berbasis eksploitasi sebagai produk andalan.

Pertama, pada level makro tidak adanya keterkaitan antara kebijakan ekonomi dengan kebijakan teknologi. Salah satunya terjadi pada kebijakan

Penanaman Modal Asing (PMA) yang tidak pernah diintegrasikan dengan kebijakan teknologi. Sejak diberlakukannya UU PMA 1967 pada awal pemerintahan Orde Baru hingga sekarang tidak pernah sekalipun dipersyaratkan bagi investor asing untuk melakukan alih teknologi dalam menanamkan modal di Indonesia. Padahal, negara lain seperti Singapura secara tegas mensyaratkan bagi setiap investor asing untuk melakukan proses alih teknologi secara bertahap dalam menetapkan kebijakan PMA. Dampaknya, kemampuan teknologi (*technological capability*) tenaga kerja Indonesia di berbagai sektor industri masih sangat rendah. Industri otomotif misalnya, meskipun Indonesia sudah memasuki industri otomotif sejak 50 tahun yang lalu, namun kemampuan teknologi tenaga kerjanya masih masih terbatas pada penguasaan teknologi perakitan saja, sedang teknologi design dan pengembangan produk baru belum pernah dikuasai, seperti yang dinyatakan dalam UU NO.3 Tahun 2004 pasal 7 yaitu:

1. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.”

Kedua, tidak adanya komitmen dari pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur teknologi (*technological infrastructure*) yang mutlak dibutuhkan bagi pengembangan komoditi berbasis teknologi. Salah satu indikatornya adalah rendahnya pengeluaran APBN untuk membiayai kedua komponen teknologi infrastruktur, yakni R&D dan pendidikan. Selama lima tahun terakhir ini, alokasi pengeluaran untuk R&D rata-rata per tahun hanya sebesar 0,02 persen dari GNP. Bandingkan dengan alokasi pengeluaran untuk R&D di Singapura dan Malaysia rata-rata per tahun mencapai sebesar 1,1 persen dan 0.4 persen dari GNP. Kencenderungan yang sama terjadi ada pengeluaran untuk sektor pendidikan. Dalam waktu yang sama, pengeluaran pemerintah Indonesia untuk sektor pendidikan rata-rata per tahun hanya sebesar 1.9 persen dari GNP, bandingkan

dengan pengeluaran pemerintah Singapura dan Malaysia yang mencapai rata-rata pertahun sebesar 5,2 persen dan 5,8 persen dari GNP.

G. Pengertian Sistem

Sistem menurut Chester A. Bernard, adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik, yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Suatu sistem pada dasarnya adalah “organisasi besar” yang menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat, untuk suatu sistem sosial atau sistem kemasyarakatan dapat berupa makhluk-makhluk hidup dan benda alam, untuk suatu sistem kehidupan atau kumpulan fakta, dan untuk sistem informasi atau bahkan kombinasi dari subjek-subjek tersebut.

Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga atau wadah tempat subjek (objek) itu berhubungan, cara kerja dan mekanisme yang menjalin hubungan subjek (objek) tadi, serta kaidah atau norma yang mengatur hubungan subjek (objek) tersebut agar serasi.

Kaidah atau norma yang dimaksud bisa berupa aturan atau peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, untuk suatu sistem yang menjalin hubungan antar manusia. Contohnya aturan-aturan dalam suatu sistem kekerabatan. Secara teoritis pengertian sistem ekonomi dapat dikatakan sebagai keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh suatu bangsa atau negara dalam mencapai cita-cita yang telah ditetapkan.

Pengertian lembaga atau institusi ekonomi adalah suatu pedoman atau, atauran atau kaidah yang digunakan seseorang atau masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha(bisnis), dengan pasar, transaksi jual-beli, dan pembayaran dengan uang. Pengertian ekonomi secara lembaga yaitu produk-produk hukum tertulis, seperti Tap MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, ARD/ART suatu organisasi dan lain-lain.

H. Sistem Ekonomi

Persoalan-persoalan ekonomi pada hakekatnya adalah masalah transformasi atau pengolahan alat-alat/sumber pemenuh/pemuas kebutuhan, yang berupa faktor-faktor produksi yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam dan keterampilan (*skill*) menjadi barang dan jasa.

Sistem ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas persoalan pengambilan keputusan dalam tata susunan organisasi ekonomi untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi untuk mewujudkan tujuan nasional suatu negara. Menurut Dumairy (1966), Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan, selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suatu supra sistem kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan masyarakat di suatu negara.

Pada negara-negara yang berideologi politik leiberalisme dengan rezim pemerintahan yang demokratis, pada umumnya menganut ideologi ekonomi kapitalisme dengan pengelolaan ekonomi yang berlandaskan pada mekanisme pasar. Di negara-negara ini penyelenggara kenegaraannya cenderung bersifat etatis dengan struktur birokrasi yang sentralistik. Sistem ekonomi suatu negara dikatakan bersifat khas sehingga dibedakan dari sistem ekonomi yang berlaku atau diterapkan di negara lain. Berdasarkan beberapa sudut tinjauan seperti :

1. Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi
2. Keluwesan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya
3. Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.

I. Macam-Macam Sistem Ekonomi

1. Sistem Ekonomi Liberal-Kapetalis

Sistem ekonomi leiberal-kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atau sumber daya-sumber daya ekonomi atau faktor produksi. Secara garis besar, ciri-ciri ekonomi liberal kapitalis adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pengakuan yang luas terhadap hak pribadi
- b. Praktek perekonomian di atus menurut mekanisme pasar
- c. Praktek perekonomian digerakan oleh motif keuntungan (*profile motife*)

2. Sistem Ekonomi Sosialis-Komunistik

Dalam sistem ekonomi sosialis-komunistis adalah kebalikannya, dimana sumber daya ekonomi atau faktor produksi dikuasai sebagai milik negara. Suatu negara yang menganut sistem ekonomi sosialis-komunis, menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian.

Dalam sistem ini yang menonjol adalah kebersamaan, dimana semua alat produksi adalah milik bersama (negara) dan didistribusikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

3. Sistem Ekonomi Campuran (*mixed ekonomi*)

Di samping kedua ekstrim sistem ekonomi tersebut, terdapat sebuah sistem yang lain yang merupakan “atas campuran : antara keduanya, dengan berbagai fariasi kadar donasinya, dengan berbagai fariasi nama dan oleh istilahnya. Sistem ekonomi campuran pada umumnya diterapkan oleh negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ke tiga.

Beberapa negara di antaranya cukup konsisten dalam meramu sistem ekonomi campuran, dalam arti kadar kapitalisnya selalu lebih tinggi (contoh Filipina) atau bobot sosialismenya lebih besar (contoh India). Namun banyak pula yang goyah dalam meramu campuran kedua sistem ini, kadang-kadang condong kapitalistik.

Pada dasarnya sistem ekonomi campuran atau sistem ekonomi kerakyatan dengan persaingan terkendali, agaknya merupakan sistem ekonomi yang paling

cocok untuk mengelola perekonomian di Indonesia, namun demikian akhir-akhir ini sistem ekonomi Indonesia semakin condong ke ekonomi liberal dan kapitalis hal ini ditandai dengan derasnya modal asing yang mau ke Indonesia dan banyaknya BUMN dan BUMD yang telah diprivatisasi. Kecenderungan tersebut dipacu derasnya arus globalisasi dan bubarnya sejumlah negara komunis di Eropa Timur yang bersistem ekonomi sosialisme-komunistik.

J. Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia

1. Perkembangan Pemikiran Sistem Ekonomi Indonesia

Seperti yang kita ketahui bahwa yang menentukan bentuk suatu sistem ekonomi kecuali dasar falsafah negara yang dijunjung tinggi, maka yang dijadikan kriteria adalah lembaga-lembaga, khususnya lembaga ekonomi yang menjadi perwujudan atau realisasi falsafah tersebut.

Pergulatan pemikiran tentang sistem ekonomi apa yang sebaiknya di diterapkan Indonesia telah dimulai sejak Indonesia belum mencapai kemerdekaannya. Sampai sekarang pergulatan pemikiran tersebut masih terus berlangsung, hal ini tecermin dari perkembangan pemikiran tentang sistem ekonomi pancasila SEP. Menurut Sri-Edi Suwasono (1985), pergulatan pemikiran tentang ESP pada hakikatnya merupakan dinamika penafsiran tentang pasal-pasal ekonomi dalam UUD 1945.

a. Pasal Ekonomi Dalam UUD 1945

Pasal 33 UUD 1945, yang dimaksud dengan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah barang dan jasa yang vital bagi kehidupan manusia, dan tersedia dalam jumlah yang terbatas. Tinjauan terhadap vital tidaknya suatu barang tertentu terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf hidup dan peningkatan permintaan.

Dengan demikian penafsiran pasal-pasal di ataslah yang banyak mendominasi pemikiran SEP. Pemikiran tentang ESP, sudah banyak, namun ada beberapa yang perlu dibahas secara rinci karena mereka merupakan *founding*

father dan juga tokoh-tokoh ekonomi yang ikut mewarnai sistem ekonomi kita, diantaranya:

b. Pemikiran Mohammad Hatta (Bung Hatta)

Bung Hatta selain sebagai tokoh Proklamator bangsa Indonesia, juga dikenal sebagai perumus pasal 33 UUD 1945. Bung Hatta menyusun pasal 33 didasari pada pengalaman pahit bangsa Indonesia yang selama berabad-abad dijajah oleh bangsa asing yang menganut sistem ekonomi liberal-kapitalistik. Penerapan sistem ini di Indonesia telah menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan, oleh karena itu menurut Bung Hatta sistem ekonomi yang baik untuk diterapkan di Indonesia harus berasaskan kekeluargaan

c. Pemikiran Wipolo

Pemikiran Wipolo disampaikan pada perdebatan dengan Wijoyo Nitisastro tentang pasal 38 UUDS (pasal ini identik dengan pasal 33 UUD 1945), 23 september 1955. Menurut Wipolo, pasal 33 memiliki arti SEP sangat menolak sistem liberal, karena itu SEP juga menolak sektor swasta yang merupakan penggerak utama sistem ekonomi liberal-kapitalistik

d. Pemikiran Wijoyo Nitisastro

Pemikiran Wijoyo Nitisastro ini merupakan tanggapan terhadap pemikiran Wipolo. Menurut Wijoyo Nitisastro, pasal 33 UUD 1945 sangat ditafsirkan sebagai penolakan terhadap sektor swasta.

e. Pemikiran Mubyarto

Menurut Mubyarto, SEP adalah sistem ekonomi yang bukan kapitalis dan juga sosialis. Salah satu perbedaan SEP dengan kapitalis atau sosialis adalah pandangan tentang manusia. Dalam sistem kapitalis atau sosialis, manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan akan materi saja.

f. Pemikiran Emil Salim

Konsep Emil Salim tentang SEP sangat sederhana, yaitu sistem ekonomi pasar dengan perencanaan. Menurut Emil Salim, di dalam sistem tersebutlah tercapai keseimbangan antara sistem komando dengan sistem

pasar. “*lazimnya suatu sistem ekonomi bergantung erat dengan paham-ideologi yang dianut suatu negara.*”

Sumitro Djojohadikusumo dalam pidatonya di hadapan *School of Advanced International Studies* di Wasington, AS Tanggal 22 Februari 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah suatu macam ekonomi campuran. Lapangan-lapangan usaha tertentu akan dinasionalisasi dan dijalankan oleh pemerintah, sedangkan yang lain-lain akan terus terletak dalam lingkungan usaha swasta.

K. Tahap-Tahap Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Sebelum membahas tentang pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu kita akan bahas beberapa teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan beberapa ahli. Pada abad-19 banyak ahli ekonomi yang menganalisis dan membahas, serta mengemukakan teori-teori tentang tingkat-tingkat pertumbuhan ekonomi. Antara lain Retrich List, Brunohilder Brand, Karl Bucher dan Walt Whitman Rostow.

Retrich List adalah penganut paham *laisser-vaire* dan berpendapat bahwa sistim ini dapat menjamin alokasi sumber-sumber secara optimal tetapi proteksi terhadap industri-industri tetap diperlukan.

Brunohilder Brand adalah pengkritik Retrich List, mereka mengatakan bahwa perkembangan masyarakat atau ekonomi bukan karena sifat-sifat produksi atau konsumsinya, tetapi lebih ditekankan pada metode distribusi yang digunakan. Brunohilder Brand mengemukakan 3 (tiga) sistim distribusi yaitu :

- a. Natural atau perekonomian barter
- b. Perekonomian uang
- c. Perekonomian kredit

Sedangkan Karl Bucher mempunyai pendapat yang serupa walaupun tidak sama. Karl Bucher mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah melalui 3 (tiga) tingkatan yaitu :

- a. Produksi untuk kebutuhan sendiri
- b. Perekonomian kota, dimana pertukaran sudah meluas

c. Perekonomian nasional, dimana peranan pedagang-pedagan tampak makin penting jadi barang-barang itu diproduksi untuk pasar. Ini merupakan gambaran revolusi di Jerman.

Walt Whitman Rostow dalam bukunya : *De Stages of Economic Growth* mengemukakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan dalam 5 tahap dan setiap negara di dunia dapat digolongkan ke dalam salah satu tahap dari 5 tahap pertumbuhan ekonomi tersebut. Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi Rostow adalah :

1. Tahap masyarakat tradisional
2. Tahap prasyarat lepas landas
3. Tahap lepas landas
4. Gerakan ke arah kedewasaan
5. Masa konsumsi tinggi

2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, masa orde lama, masa orde baru sampai masa sekarang (masa reformasi) Indonesia telah memperoleh banyak pengalaman politik dan ekonomi. Peralihan dari orde lama dan orde baru telah memberikan iklim politik yang dinamis walaupun akhirnya mengarah ke otoriter namun pada kehidupan ekonomi mengalami perubahan yang lebih baik.

1. Masa Orde Lama (1945-1966)

Pada masa ini perekonomian berkembang kurang menggembirakan, sebagai dampak ketidakstabilan politik dan seringnya pergantian kabinet.

2. Masa Orde Baru (1966-1997)

Menghadapi perekonomian yang sedemikian rupa, pemerintah peralihan menetapkan beberapa langkah prioritas kebijakan ekonomi sebagai berikut :

- a. Memerangi inflasi
- b. Mencukupkan stok cadangan bahan pangan terutama beras
- c. Merehabilitasi prasarana perekonomian
- d. Meningkatkan ekspor
- e. Menyediakan/menciptakan lapangan kerja

f. Mengundang kembali investor asing

3. Masa Reformasi (1998-sekarang)

Pada masa reformasi ini perekonomian Indonesia ditandai dengan krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda ke arah pemulihan. Walaupun ada pertumbuhan ekonomi sekitar 6% untuk tahun 1997 dan 5,5% untuk tahun 1998 dimana inflasi sudah diperhitungkan namun laju inflasi masih cukup tinggi yaitu sekitar 100%.

Pada tahun 1998 hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan negatif, hal ini berbeda dengan kondisi ekonomi tahun 1999.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, secara umum adalah :

- 1). Faktor produksi
- 2). Faktor investasi
- 3). Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran
- 4). Faktor kebijakan moneter dan inflasi
- 5). Faktor keuangan negara

L. Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia

Chenery mengatakan bahwa perubahan struktur ekonomi disebut sebagai transformasi struktur yang diartikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu sama lain dalam komposisi *agregat demand* (AD), *ekspor-impor* (X-M). Agregat supply (AS) yang merupakan produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berlanjut (Tambunan, 2003).

Ada dua teori utama yang umum digunakan dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi, yakni dari Arthur Lewis tentang teori migrasi dan H.O. Chenery tentang teori transportasi struktural. Teori Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Dalamnya Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu perekonomian tradisional di

pedesaan yang didominasi sector pertanian dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sector utama. Karena perekonomiannya masih bersifat tradisional dan sub sistem, dan pertumbuhan penduduk yang tinggi maka terjadi kelebihan supply tenaga kerja.

M. Struktur Perekonomian Indonesia

Berdasarkan tinjauan makro-sektoral perekonomian suatu negara dapat berstruktur agraris (*agricultural*), industri (*industrial*), niaga (*commercial*) hal ini tergantung pada sector apa/mana yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian negara yang bersangkutan.

Pergeseran struktur ekonomi secara makro-sektoral senada dengan pergeserannya secara keuangan (*spasial*). Ditinjau dari sudut pandang keuangan (*spasial*), struktur perekonomian telah bergeser dari struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan modern.

Struktur perekonomian Indonesia sejak awal orde baru hingga pertengahan dasa warsa 1980-an berstruktur *etatis* dimana pemerintah atau negara dengan BUMN dan BUMD sebagai perpanjangan tangannya merupakan pelaku utama perekonomian Indonesia. Baru mulai pertengahan dasa warsa 1990-an peran pemerintah dalam perekonomian berangsur-angsur dikurangi, yaitu sesudah secara eksplisit dituangkan melalui GBHN 1988/1989 mengundang kalangan swasta untuk berperan lebih besar dalam perekonomian nasional.

Struktur ekonomi dapat pula dilihat berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusannya dapat dikatakan bahwa struktur perekonomian selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama adalah sentralistik. Dalam struktur ekonomi yang sentralistik, pembuatan keputusan (*decision-making*) lebih banyak ditetapkan pemerintah pusat atau kalangan atas pemerintah (*bottom-up*).

N. Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Pengertian perencanaan bermakna sangat kompleks apa lagi disertai dengan istilah pembangunan. Sampai sekarang belum ada definisi perencanaan

yang memuaskan semua pihak, karena masing-masing ahli tentang perencanaan mendefinisikan menurut pengertiannya masing-masing.

Y. Dior dalam bukunya "*The Planing Process*" mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Dengan definisi tersebut bahwa perencanaan mempunyai unsure-unsur sebagai berikut :

1. Berhubungan dengan hari depan
2. Menyusun seperangkat kegiatan secara sistematis
3. Dirancang untuk mencapai tujuan tertentu

O. Perencanaan Pembangunan di Indonesia

Sejarah perencanaan pembangunan di Indonesia sejak tahun 1945 hingga kini mengalami berbagai perkembangan sejalan dengan tingkat stabilitas politik dan keamanan. Artinya faktor-faktor sosial politik ekonomi, perhitungan akurat yang tidak ambisius, pengawasan yang kontinyu, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi yang baik, serta pembiayaan yang memadai, merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu negara.

Salah satu kendala pada awal kemerdekaan adalah keterbatasan data, sehingga pemerintah belum menyusun perencanaan yang baik. Namun pemerintah Indonesia terus berupaya memperbaiki perekonomian yang berantakan akibat peperangan, pemberontakan dan reformasi perpolitikan di Indonesia. Usaha-usaha tersebut mulai tercermin mulai dari pembentukan Panitia Pemikiran Siasat Ekonomi sampai disusunnya Program Pembangunan Nasional (Propenas).

P. Plan Mengatur Ekonomi Indonesia

Program yang direncanakan dalam Plan Mengatur Ekonomi Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat merata melalui :

1. Mengintensifkan usaha produksi
2. Memajukan perdagangan internasional
3. Meningkatkan standar hidup masyarakat
4. Meningkatkan kecerdasan bangsa

Perogram-program yang telah direncanakan tersebut akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan impor barang-barang sandang, alat-alat transportasi dan perhubungan, barang-barang modal, barang-barang keperluan lainnya
2. Meningkatkan ekspor yang diprioritaskan pada hasil perkebunan, kehutanan, minyak dan logam
3. Memperbaiki organisasi ke dalam melalui:
 - a. Penetapan upah minimum
 - b. Perbaikan perumahan rakyat
 - c. Transmigrasi
 - d. Peningkatan pembangunan jalan kereta api baru, bendungan, tenaga listrik dan pelabuhan
 - e. Industrilisasi
 - f. Tambang dan minyak tanah
 - g. Industri pertanian
 - h. Pertanian dan perikanan
 - i. Penanaman hutan
 - j. Pelayaran dan perhubungan antar pulau

Q. Sejarah Ekonomi Indonesia

Pola dan proses dinamika pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh:

1. **Faktor Internal:** kondisi fisik (iklim), lokasi geografis, jumlah dan kualitas sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi awal ekonomi, sosial dan budaya, system politik, dan peran pemerintah dalam pembangunan
2. **Faktor eksternal:** perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, dan keamanan global

Mengapa Malaysia, Hongkong, India dan Singapura yang dijajah oleh Inggris mengalami pembangunan yang lebih maju di bandingkan dengan Indonesia yang dijajah oleh Belanda?. Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak ditentukan oleh siapa penjajahnya, tapi ditentukan oleh:

- a. Orientasi politik
- b. Sistem ekonomi
- c. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi setelah pemerintahan penjajah

Tahap masyarakat tradisional

- b. Tahap prasyarat lepas landas
- c. Tahap lepas landas
- d. Gerakan ke arah kedewasaan
- e. Masa konsumsi tinggi

1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, masa orde lama, masa orde baru sampai masa sekarang (masa reformasi) Indonesia telah memperoleh banyak pengalaman politik dan ekonomi. Peralihan dari orde lama dan orde baru telah memberikan iklim politik yang dinamis walaupun akhirnya mengarah ke otoriter namun pada kehidupan ekonomi mengalami perubahan yang lebih baik.

a. Masa Orde Lama (1945-1966)

Pada masa ini perekonomian berkembang kurang menggembirakan, sebagai dampak ketidakstabilan politik dan seringnya pergantian kabinet.

b. Masa Orde Baru (1966-1997)

Menghadapi perekonomian yang sedemikian rupa, pemerintah peralihan menetapkan beberapa langkah prioritas kebijakan ekonomi sebagai berikut :

- 1). Memerangi inflasi
- 2). Mencukupkan stok cadangan bahan pangan terutama beras
- 3). Merehabilitasi prasarana perekonomian
- 4). Meningkatkan ekspor
- 5). Menyediakan/menciptakan lapangan kerja
- 6). Mengundang kembali investor asing

c. Masa Reformasi (1998-sekarang)

Pada masa reformasi ini perekonomian Indonesia ditandai dengan krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda ke arah pemulihan. Walaupun ada pertumbuhan ekonomi sekitar 6% untuk tahun 1997 dan 5,5% untuk tahun 1998 dimana inflasi sudah diperhitungkan namun laju inflasi masih cukup tinggi yaitu sekitar 100%.

Pada tahun 1998 hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan negatif, hal ini berbeda dengan kondisi ekonomi tahun 1999

R. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, secara umum adalah :

- 1). Faktor produksi
- 2). Faktor investasi
- 3). Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran
- 4). Faktor kebijakan moneter dan inflasi
- 5). Faktor keuangan negara

S. PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI INDONESIA

Chenery mengatakan bahwa perubahan struktur ekonomi disebut sebagai transformasi struktur yang diartikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu sama lain dalam komposisi *agregat demand* (AD), *ekspor-impor* (X-M). Agregat supply (AS) yang merupakan produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berlanjut (Tambunan, 2003).

Ada dua teori utama yang umum digunakan dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi, yakni dari Arthur Lewis tentang teori migrasi dan H.O. Chenery tentang teori transportasi struktural. Teori Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Dalamnya Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi sektor pertanian dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor utama. Karena perekonomiannya masih

bersifat tradisional dan sub sistem, dan pertumbuhan penduduk yang tinggi maka terjadi kelebihan supply tenaga kerja.

T. Struktur Perekonomian Indonesia

Berdasarkan tinjauan makro-sektoral perekonomian suatu negara dapat berstruktur agraris (*agricultural*), industri (*industrial*), niaga (*commercial*) hal ini tergantung pada sector apa/mana yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian negara yang bersangkutan.

Pergeseran struktur ekonomi secara makro-sektoral senada dengan pergeserannya secara keuangan (*spasial*). Ditinjau dari sudut pandang keuangan (*spasial*), struktur perekonomian telah bergeser dari struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan modern.

Struktur perekonomian Indonesia sejak awal orde baru hingga pertengahan dasa warsa 1980-an berstruktur *etatis* dimana pemerintah atau negara dengan BUMN dan BUMD sebagai perpanjangan tangannya merupakan pelaku utama perekonomian Indonesia. Baru mulai pertengahan dasa warsa 1990-an peran pemerintah dalam perekonomian berangsur-angsur dikurangi, yaitu sesudah secara eksplisit dituangkan melalui GBHN 1988/1989 mengundang kalangan swasta untuk berperan lebih besar dalam perekonomian nasional.

Struktur ekonomi dapat pula dilihat berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusannya dapat dikatakan bahwa struktur perekonomian selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama adalah sentralistik. Dalam struktur ekonomi yang sentralistik, pembuatan keputusan (*decision-making*) lebih banyak ditetapkan pemerintah pusat atau kalangan atas pemerintah (*bottom-up*).

U. PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Pengertian perencanaan bermakna sangat kompleks apa lagi disertai dengan istilah pembangunan. Sampai sekarang belum ada definisi perencanaan yang memuaskan semua pihak, karena masing-masing ahli tentang perencanaan mendefenisikan menurut pengertiannya masing-masing.

Y. Dior dalam bukunya "*The Planing Process*" mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Dengan definisi tersebut bahwa perencanaan mempunyai unsure-unsur sebagai berikut :

4. Berhubungan dengan hari depan
5. Menyusun seperangkat kegiatan secara sistematis
6. Dirancang untuk mencapai tujuan tertentu

V. Perencanaan Pembangunan di Indonesia

Sejarah perencanaan pembangunan di Indonesia sejak tahun 1945 hingga kini mengalami berbagai perkembangan sejalan dengan tingkat stabilitas politik dan keamanan. Artinya faktor-faktor sosial politik ekonomi, perhitungan akurat yang tidak ambisius, pengawasan yang kontinyu, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi yang baik, serta pembiayaan yang memadai, merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu negara.

Salah satu kendala pada awal kemerdekaan adalah keterbatasan data, sehingga pemerintah belum menyusun perencanaan yang baik. Namun pemerintah Indonesia terus berupaya memperbaiki perekonomian yang berantakan akibat peperangan, pemberontakan dan reformasi perpolitikan di Indonesia. Usaha-usaha tersebut mulai tercermin mulai dari pembentukan Panitia Pemikiran Siasat Ekonomi sampai disusunnya Program Pembangunan Nasional (Propenas).

W. Plan Mengatur Ekonomi Indonesia

Program yang direncanakan dalam Plan Mengatur Ekonomi Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat merata melalui :

1. Mengintensifkan usaha produksi
2. Memajukan perdagangan internasional
3. Meningkatkan standar hidup masyarakat
4. Meningkatkan kecerdasan bangsa

Perogram-program yang telah direncanakan tersebut akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan impor barang-barang sandang, alat-alat transportasi dan perhubungan, barang-barang modal, barang-barang keperluan lainnya
2. Meningkatkan ekspor yang diprioritaskan pada hasil perkebunan, kehutanan, minyak dan logam
3. Memperbaiki organisasi ke dalam melalui
 - a. Penetapan upah minimum
 - b. Perbaikan perumahan rakyat
 - c. Transmigrasi
 - d. Peningkatan pembangunan jalan kereta api baru, bendungan, tenaga listrik dan pelabuhan
 - e. Industrilisasi
 - f. Tambang dan minyak tanah
 - g. Industri pertanian
 - h. Pertanian dan perikanan
 - i. Penanaman hutan
 - j. Pelayaran dan perhubungan antar pulau

Pola dan proses dinamika pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh:

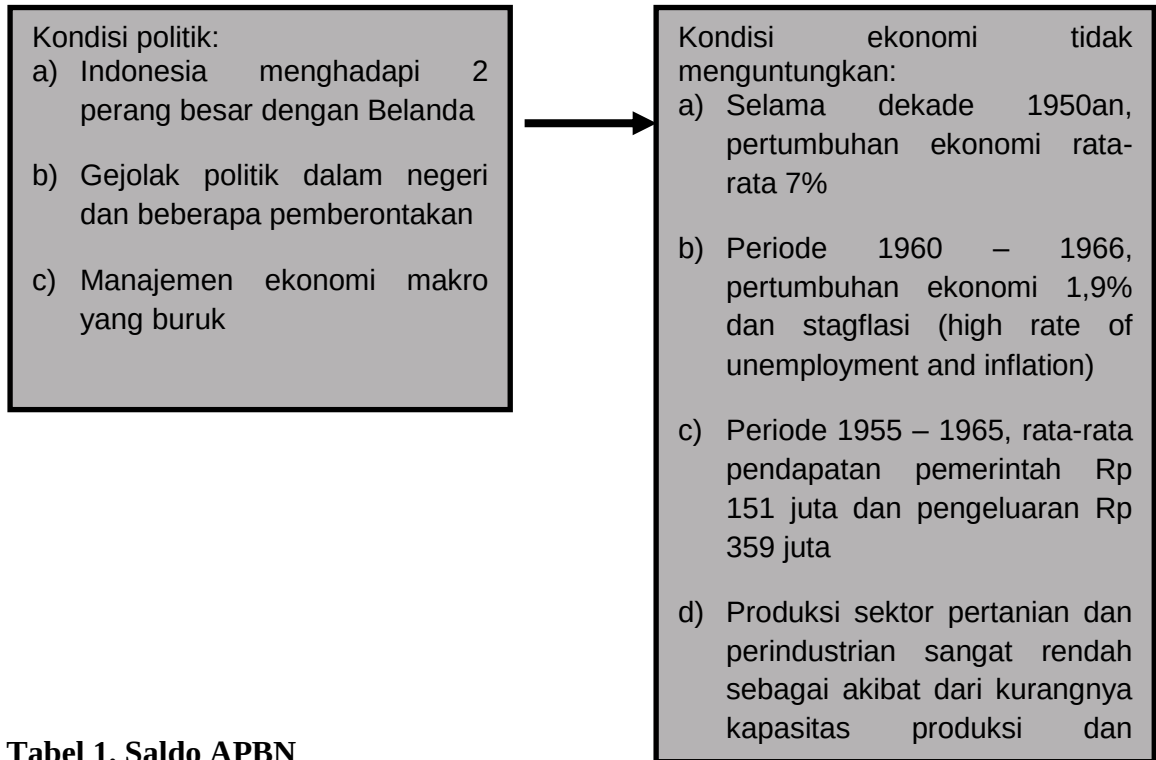
- 1) **Faktor Internal:** kondisi fisik (iklim), lokasi geografis, jumlah dan kualitas sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi awal ekonomi, sosial dan budaya, system politik, dan peran pemerintah dalam pembangunan
- 2) **Faktor eksternal:** perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, dan keamanan global

Mengapa Malaysia, Hongkong, India dan Singapura yang dijajah oleh Inggris mengalami pembangunan yang lebih maju di bandingkan dengan Indonesia yang dijajah oleh Belanda?. Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak ditentukan oleh siapa penjajahnya, tapi ditentukan oleh:

1. Orientasi politik
2. Sistem ekonomi

3. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi setelah pemerintahan penjajah

a. Pemerintahan Orde Lama



Tabel 1. Saldo APBN

Tahun	Pendapatan	Pengeluaran	Saldo
1955	14	16	-2
1956	18	21	-3
1957	21	26	-5
1958	23	35	-12
1959	30	44	-14
1960	50	58	-8
1961	62	88	-26
1962	75	122	-47
1963	162	330	-168
1964	283	681	-398
1965	923	2.526	-1603

Tabel 2. Perkembangan Inflasi dan Jumlah Uang Beredar.

Tahun	Indeks Harga (1954=100)	Pengeluaran
1955	135	12,20
1956	133	13,40
1957	206	18,90
1958	243	29,40
1959	275	34,90
1960	330	47,90
1961	644	67,60
1962	1.648	135,90
1963	3.770	263,40
1964	8.870	675,10
1965	61.400	2.582,0
1966	152.200	5.593,4

Dumairy (1996) menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia:

1. Periode 1945 – 1950.
2. Periode demokrasi parlementer/liberal (1950 – 1959)

Banyak partai politik

Sektor formal: pertambangan, pertanian, distribusi, bank, dan transportasi yang padat modal dan dikuasai oleh asing serta berorientasi ekspor memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDB

8 kali perubahan kabinet:

- a. Kabinet Hatta dengan kebijakan Reformasi moneter via devaluasi mata uang local (Gulden) dan pemotongan uang sebesar 50% atas uang kertas yang beredar yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank dengan nilai nominal > 2,50 Gulden Indonesia.

- b. Kabinet Natsir dengan kebijakan perumusan perencanaan pembangunan ekonomi yang disebut dengan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP)
- c. Kabinet Sukiman dengan kebijakan nasionalisasi oleh De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia dan penghapusan system kurs berganda
- d. Kabinet Wilopo dengan kebijakan anggaran berimbang dalam APBN, memperketat impor, merasionalisasi angkatan bersenjata dengan modernisasi dan pengurangan jumlah personil, serta pengirisan pengeluaran pemerintah
- e. Kabinet Ali I dengan kebijakan pembatasan impor dan kebijakan uang ketat
- f. Kabinet Burhanudin dengan kebijakan liberalisasi impor, kebijakan uang ketat untuk menekan jumlah uang yang beredar, dan penyempurnaan program benteng (bagian dari program RUP yakni program diskriminasi rasial untuk mengurangi dominasi ekonomi), memperkenalkan investasi asing masuk ke Indonesia, membantu pengusaha pribumi, serta menghapus persetujuan meja bundar (menghilangkan dominasi belanda perekonomian nasional.
- g. Kabinet Ali II dengan kebijakan rencana pembangunan lima tahun 1956 - 1960
- h. Kabinet Djuanda dengan kebijakan stabilitas politik dan nasionalisasi perusahaan belanda.

3. Periode demokrasi terpimpin (1959 – 1965)

Dilakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan belanda.

Lebih cenderung kepada pemikiran sosialis komunis Politik tidak stabil sampai pada puncaknya pada September 1965

2. Pemerintahan Orde Baru

Sejak Maret 1966. Pemerintah mengarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial.

Pemerintah meninggalkan ideologi komunis dan menjalin hubungan dengan Negara barat dan menjadi anggota PBB, IMF, dan Bank Dunia.

Kondisi perekonomian Indonesia:

- a. ketidakmampuan membayar hutang LN US \$32 Milyar
- b. Penerimaan ekspor hanya setengah dari pengeluaran untuk impor
- c. Pengendalian anggaran belanja dan pemungutan pajak yang tidak berdaya
- d. Inflasi 30 – 50 persen per bulan
- e. Kondisi prasarana perekonomian yang buruk
- f. Kapasitas produktif sektor industri dan ekspor menurun

Prioritas kebijakan ekonomi:

1. Memerangi hiperinflasi
2. Mencukupkan persediaan pangan (beras)
3. merehabilitasi prasarana perekonomian
4. Peningkatan ekspor
5. Penyediaan lapangan kerja
6. Mengundang investor asing

Program ekonomi orde baru mencakup:

1. Jangka pendek
 - a. Juli – Desember 1966 untuk program pemulihan
 - b. Januari – Juni 1967 untuk tahap rehabilitasi
 - c. Juli – Desember 1967 untuk tahap konsolidasi
 - d. Januari – Juni 1968 untuk tahap stabilisasi

2. Jangka panjang yang berupa Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) mulai April tahun 1969.

Dalam rangka mendukung kebijakan jangka pendek, pemerintah:

1. Memperkenalkan kebijakan anggaran berimbang (balanced budget policy)

2. Pembentukan IGGI
3. Melakukan reformasi terhadap sistem perbankan
 - a. UU tahun 1967 tentang Perbankan
 - b. UU tahun 1968 tentang Bank Sentral
 - c. UU tahun 1968 tentang Bank Asing
4. Menjadi anggota kembali IMF
5. Pemberian peran yang lebih besar kepada bank bank dan lembaga keuangan lain sebagai ”agen pembangunan”. Dengan memobilisasi tabungan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memainkan peranan penting untuk pembangunan pasar uang dan pasar modal.

Mulai 1 April 1969, Program pembangunan jangka panjang terdiri dari tahapan-tahapan REPELITA dengan sasaran:

1. stabilitas perekonomian
2. pertumbuhan ekonomi
3. pemerataan hasil pembangunan

REPELITA I ➔ 1969 – 1974 dengan sasaran: (a) stabilitas perekonomian; (b) pertumbuhan ekonomi; dan (c) pemerataan hasil pembangunan

REPELITA II ➔ 1974 – 1979 dengan sasaran: (a) pertumbuhan ekonomi; (b) pemerataan hasil pembangunan; dan (c) stabilitas perekonomian

REPELITA III ➔ 1979 – 1984, REPELITA IV ➔ 1984 – 1989, REPELITA V ➔ 1989 – 1994, REPELITA VI ➔ 1994 – 1999 dengan sasaran: (a) pemerataan hasil pembangunan; (b) pertumbuhan ekonomi dan (c) stabilitas perekonomian

Prestasi Ekonomi dan Kondisi Ekonomi Per REPELITA.

REPELITA I dan II

Prestasi:

1. Pertumbuhan ekonomi 6 persen per tahun
2. Investasi meningkat dari 11 persen menjadi 24 persen dari PDB selama 10 tahun
3. Kontribusi tabungan meningkat dari 23 persen menjadi 55 persen
4. Sumber penghasilan utama devisa adalah ekspor minyak bumi kurang lebih 2/3 dari total penerimaan

5. Inflasi rata-rata 17 persen
6. Porsi pelunasan hutang 9,3 persen dan 11,8 persen dari pengeluaran

Kondisi:

Boom minyak tahun 1973 dan 1978

Kebijakan:

Devaluasi rupiah dari Rp 415 menjadi Rp 625/\$

REPELITA III

Prestasi:

1. Ekspor neto migas turun 38 persen
2. Ekspor nonmigas turun 30 persen
3. Impor nonmigas meningkat
4. Neraca berjalan (current account) dari surplus US \$2.7 milyar menjadi defisit US \$6.7 milyar
5. PDB tumbuh hanya 2,24 persen
6. Laju inflasi rata-rata 9 persen
7. Porsi pelunasan hutang 17,3 persen dari pengeluaran

Kondisi:

1. Boom minyak tahun 1982/1983
2. Kemelut minyak dan resesi dinegara industri menyebabkan OPEC memotong harga dan produksi minyak
3. Devaluasi 28 persen tahun 1983

Kebijakan:

1. Penghematan anggaran belanja
2. Penambahan pinjaman luar negeri
3. Penggalakan ekspor nonmigas
4. Pembatasan impor barang mewah
5. Pengurangan perjalanan ke luar negeri
6. Penggalakan penggunaan barang dalam negeri
7. Penjadualan ulang dan pembatalan 50 persen proyek sektor publik
8. Gaji pegawai negeri tidak dinaikkan

9. Peningkatan harga bahan bakar minyak tahun 1984 dengan mengurangi subsidi
10. Pengurangan subsidi atas pupuk, pestisida, dan pangan
11. Pembaharuan UU perpajakan tahun 1984
12. Deregulasi parsial sistem perbankan dengan menyerahkan penentuan tingkat bunga kepada masing-masing bank peniadakan sistem pagu kredit

REPELITA IV

Prestasi:

1. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,32 persen
2. Beban hutang luar negeri menjadi membesar
3. Penghematan anggaran dan pengawasan serta penertiban penggunaan anggaran
4. Perkembangan pasar modal dan sektor perbankan yang luar biasa
5. Laju inflasi rata-rata 9 persen
6. Porsi pelunasan hutang 41,2 persen dari pengeluaran

Kondisi:

Harga minyak turun menjadi US \$10

Kebijakan:

1. Deregulasi dan debirokratisasi untuk mengurangi campur tangan pemerintah untuk memberikan kesempatan pihak swasta dan investor asing dalam pembangunan
2. Devaluasi untuk meningkatkan ekspor non migas

REPELITA V

Prestasi:

1. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,7 persen
2. Ekspor komoditas non migas meningkat
3. Porsi pelunasan hutang 44,6 persen dari pengeluaran

Kondisi:

Harga minyak turun menjadi US \$10

Kebijakan:

Deregulasi dan debirokratisasi terus dilakukan untuk menekan ekonomi biaya tinggi dan meningkatkan efisiensi nasional

REPELITA VI

Kibijakan:

Pemberian paket-paket deregulasi dalam bentuk penyusunan dan perbaikan undang-undang yakni UU No. 25 tahun 1990 tentang koperasi, UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dan UU No. 9-12 tentang perpajakan

Prinsip Anggaran Berimbang Dinamis.

Berimbang yakni pengeluaran rutin dan pembangunan selalu sama dengan seluruh penerimaan negara

Dinamis yakni jika penerimaan $>$ pengeluaran, maka pengeluaran dapat ditingkatkan. Jika penerimaan $<$ pengeluaran, maka harus dilakukan penyesuaian pengeluaran.

Era Pembangunan Jangka Panjang II dan Globalisasi dalam kurun waktu 1994 – 2019.

Era globalisasi tahun 2020 Berdasarkan putaran Uruguay, segala bentuk proteksi perdagangan baik barang maupun jasa harus dihapuskan

Target REPELITA VI tingkat rata-rata pertumbuhan per tahun:

1. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan 6,2 persen
2. Sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan 3,5 persen
3. Sektor industri 9 persen
4. Sektor manufaktur diluar migas 10 persen
5. Sektor jasa 6,5 persen
6. Inflasi rata-rata 5 persen
7. Ekspor nonmigas 16,5 persen
8. Ekspor manufaktur 17,5 persen
9. Debt Service Ratio 20 persen
10. PDB Rp 2,150 triliun
11. Nilai Investasi Rp 660,1 triliun atau 30,7 % dari PDB

- | | |
|---|------------------|
| 12. Dana dalam negeri : (a) Pemerintah (25,5 %) | Rp 169,4 triliun |
| (b) Swasta (69 %) | Rp 454,1 triliun |
| 13. Dana luar negeri (5,5 %) | Rp 36,6 triliun |

Era PJPT II, BAPPENAS telah mensimulasikan 2 skenario terhadap pertumbuhan ekonomi;

- a. Skenario pertama (Optimis) menyatakan REPELITA VI sampai X, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7,9 persen per tahun, penekanan pertumbuhan penduduk dari 1,6 % akhir REPELITA VI menjadi 0,9 % akhir REPELITA X, pengangguran REPELITA VI 2,2 % dan akhir REPELITA X 0,5 %, dan akhir REPELITA X pendapatan perkapita Indonesia US \$3,000.
- b. Skenario kedua (Pesimis) menyatakan REPELITA VI sampai X, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 6,8 persen per tahun, penekanan pertumbuhan penduduk dari 1,6 % akhir REPELITA VI menjadi 0,9 % akhir REPELITA X, pengangguran REPELITA VI 2,6 % dan akhir REPELITA X 4 %, dan akhir REPELITA X pendapatan perkapita Indonesia US \$2,330

Kondisi utama yang harus dipenuhi untuk pembangunan ekonomi yang baik:

- a. Kemauan politik yang kuat
- b. Stabilitas ekonomi dan politik
- c. SDM yang lebih baik
- d. Sistem politik dan ekonomi yang terbuka yang berorientasi ke barat
- e. Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik

3. Pemerintahan Transisi (Habibie)

- a) Tanggal 14 dan 15 Mei 1997, kurs bath terhadap US\$ mengalami penurunan (depresiasi) sebagai akibat dari keputusan jual dari para investor yang tidak percaya lagi thd prospek ekonomi Thailand dalam jk pdk.

Pemerintah Thailand mengintervensi dan didukung oleh bank sentral singapura, tapi tidak mampu menstabilkan kurs Bath, sehingga bank sentral Thailand mengumumkan kurs bath diserahkan pada mekanisme pasar.

2 Juli 1997, penurunan nilai kurs bath terhadap US\$ antara 15% - 20%

- b) Bulan Juli 1997, krisis melanda Indonesia (kurs dari Rp 2.500 menjadi Rp 2.650.) BI mengintervensi, namun tidak mampu sampai bulan maret 1998 kurs melemah sampai Rp 10.550 dan bahkan menembus angka Rp 11.000/US\$.

Langkah konkrit untuk mengatasi krisis:

- a) Penundaan proyek Rp 39 trilyun untuk mengimbangi keterbatasan anggaran Negara
- b) BI melakukan intervensi ke bursa valas
- c) Meminta bantuan IMF dengan memperoleh paket bantuan keuangan US\$ 23 Milyar pada bulan Nopember 1997.
- d) Mencabut ijin usaha 16 bank swasta yang tidak sehat

Januari 1998 pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepakatan (LOI) dengan IMF yang mencakup 50 butir kebijakan yang mencakup:

- a) Kebijakan ekonomi makro (fiscal dan moneter) mencakup: penggunaan prinsip anggaran berimbang; pengurangan pengeluaran pemerintah seperti pengurangan subsidi BBM dan listrik; pembatalan proyek besar; dan peningkatan pendapatan pemerintah dengan mencabut semua fasilitas perpajakan, penangguhan PPN, pengenaan pajak tambahan terhadap bensin, memperbaiki audit PPN, dan memperbanyak obyek pajak.
- b) Restrukturisasi sektor keuangan
- c) Reformasi struktural

Bantuan gagal diberikan, karena pemerintah Indonesia tidak melaksanakan kesepakatan dengan IMF yang telah ditandatangani.

Indonesia tidak mempunyai pilihan kecuali harus bekerja sama dengan IMF. Kesepakatan baru dicapai bulan April 1998 dengan nama “Memorandum Tambahan mengenai Kebijakan Ekonomi Keuangan” yang merupakan kelanjutan, pelengkapan dan modifikasi 50 butir kesepakatan. Tambahan dalam kesepakatan baru ini mencakup:

- a) Program stabilisasi perbankan untuk stabilisasi pasar uang dan mencegah hiperinflasi
- b) Restrukturisasi perbankan untuk penyehatan system perbankan nasional
- c) Reformasi structural
- d) Penyelesaian utang luar negeri dari pihak swasta
- e) Bantuan untuk masyarakat ekonomi lemah.

4. Pemerintahan Reformasi (Abdurrahman Wahid)

Mulai pertengahan tahun 1999.

Target:

- a) Memulihkan perekonomian nasional sesuai dengan harapan masyarakat dan investor
- b) Menuntaskan masalah KKN
- c) Menegakkan supremasi hukum
- d) Penegakkan hak asasi manusia
- e) Pengurangan peranan ABRI dalam politik
- f) Memperkuat NKRI (Penyelesaian disintegrasi bangsa)

Kondisi:

- a) Pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi positif (mendekati 0)
- b) Tahun 2000 pertumbuhan ekonomi 5%
- c) Kondisi moneter stabil (inflasi dan suku bunga rendah)
- d) Tahun 2001, pelaku bisnis dan masyarakat kurang percaya kepada pemerintahan sebagai akibat dari pernyataan presiden yang kontroversial, KKN, dictator, dan perseteruan dengan DPR

- e) Bulan maret 2000, cadangan devisa menurun dari US\$ 29 milyar menjadi US\$ 28,875 milyar
- f) Hubungan dengan IMF menjadi tidak baik sebagai akibat dari: penundaan pelaksanaan amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia; penerapan otonomi daerah (terutama kebebasan untuk hutang pemerintah daerah dari LN); dan revisi APBN 2001.
- g) Tahun 2001, pertumbuhan ekonomi cenderung negative, IHSG merosot lebih dari 300 poin, dan nilai tukar rupiah melemah dari Rp 7000 menjadi Rp 10.000 per US\$.

5. Pemerintahan Gotong Royong (Megawati S)

Mulai pertengahan 2001 dengan kondisi:

- a) SBI 17%
- b) Bunga deposito 18%
- c) Inflasi periode Juli – Juli 2001 13,5% dengan asumsi inflasi 9,4% setelah dilakukan revisi APBN
- d) Pertumbuhan PDB 2002 sebesar 3,66% dibawah target 4% sebagai akibat dari kurang berkembangnya investasi swasta (PMDN dan PMA), ketidakstabilan politik, dan belum ada kepastian hukum.

Data Ekonomi Makro.

No.	Indikator	1998	1999	2000	2001	2002
1.	Pertumbuhan PDB (%)	-13,1	0,8	4,9	3,3	3,7
	Ekspor (US\$ Milyar):	48,8	48,7	62,1	56,3	42,5
	• Migas	7,9	9,8	14,4	12,6	8,7
	• Non migas	41	38,9	47,8	43,7	33,8
2.	Impor (US\$ Milyar):	27,3	24	33,5	31	22,3
	• Migas	2,7	3,7	6	5,5	4,6
	• Non migas	24,7	20,3	27,5	25,5	17,7

3.	Neraca perdagangan (US\$ miliar) • Migas • Non migas	21,5 5,2 16,3	24,7 6,1 18,6	28,6 8,3 20,3	25,4 5 20,2	20,2
4.	Kurs tengah	8.025	7.100	9.595	10.400	9.223
5.	Inflasi (%)	77,6	101,8	9,35	12,55	6,74
6.	Uang beredar (Rp trilyun): • Uang primer • M1 • M2 • Dana perbankan	751 101,2 577,4 573,5	101,8 124,6 646,2 625,6	125,6 162,2 747 720,4	127,8 177,7 844,1 809,1	118,9 176 856,8 815,4
7.	Kredit perbankan (US\$ trilyun)	487,4	225,1	269	307,6	331,4
8.	Suku bunga SBI 1 bulan (%)	35,52	11,93	14,53	17,62	13,10
9.	IHSG Bursa Efek Jakarta	398,04	676,92	416,3	392	369

PDB Per sector atas harga konstan (Milyar)

Sektor	2001	2002		
		Tw1	Tw2	Tw3
Pertambangan dan penggalian	38.483,3	9.715,1	9.460,4	Na
Pertanian	66.503,8	17.437,9	17.721,0	4,01%
Industri pengolahan	109.641,3	27.603,7	27.730,1	3,22%
Perdagangan, hotel dan restoran	66.691,8	16.992,1	17.124,7	2,93%
Jasa	38.749,9	9.685,4	9.708,4	0,51%
Pengangkutan dan komunikasi	31.483,0	8.260,2	8.330,5	7,83%
Keuangan, penyewaan dan jasa perusahaan	28.201,1	7.175,7	7.217,9	5,55%
Bangunan	24.168,0	6.086,8	6.146,3	2,98%
Listrik, gas dan air bersih	7.210,0	1.827,1	1.886,5	6,17%

	411.132,1	104.783,8	105.325,8	3,92%
--	-----------	-----------	-----------	-------

Tw1 ke Tw2, sector pertambangan dan penggalan tumbuh negative.

Realisasi Pertumbuhan PDB Rii Tahun 2001 dan Perkiraan Tahun 2002 dan 2003

Negara	Pertumbuhan (%)		
	2001	2002	2003
China	7,3	7,5	7,2
Hongkong	0,2	1,5	3,4
Korea Selatan	3	6,3	5,9
Taiwan	-1,9	3,3	4
Singapura	-2	3,6	4,2
Indonesia	3,3	3,7	4,5
Filipina	3,2	4	3,8
Thailand	1,8	3,5	3,5
Malaysia	0,5	3,5	5,3
Vietnam	5	5,3	6,5

Dari pernyataan-pernyataan diatas kami dapat menarik kesimpulan bahwa teknologi sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan ekonomi terutama di indonesia, dengan teknologi kita dapat membuka peluang kerja yang luas bagi seluruh masyarakat dengan mudah dan efektif, dan teknologi juga dapat mempermudah jalannya perekonomian di suatu negara, teknologi juga selalu digunakan di dalam politik, industri, pendidikan dan juga dibidang perekonomian, bahkan masyarakat menengah kebawah mayoritas menggunakan teknologi, namun teknologi juga sering disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

Dengan teknologi pihak bank indonesia juga dapat menyeimbangkan perekonomian negara indonesia dengan efisien sebagai bentuk kewajibannya 10% dari kewajiban moneter, seperti yang dinyatakan didalam uu nomor 3 tahun 2004 pasal 6 ayat 1 dan 2 yang bunyi nya sebagai berikut :

1) Modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).

2)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditambah sehingga menjadi paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter, dengan dana yang berasal dari Cadangan Umum atau dari hasil revaluasi aset.

Dengan teknologi kita juga dapat mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah terutama bagi pihak pengelola keuangan negara, seperti tugas bank indonesia yang tercantum dalam uu nomor 3 tahun 2004 pasal 7 ayat 1 dan 2

(1)Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.”

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Dengan teknologi pihak bank indonesia juga dapat menyeimbangkan perekonomian negara indonesia dengan efisien sebagai bentuk kewajibannya 10% dari kewajiban moneter, seperti yang dinyatakan didalam uu nomor 3 tahun 2004 pasal 6 ayat 1 dan 2 yang bunyi nya sebagai berikut :

1) Modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).

2)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditambah sehingga menjadi paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter, dengan dana yang berasal dari Cadangan Umum atau dari hasil revaluasi aset.

Dengan teknologi kita juga dapat mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah terutama bagi pihak pengelola keuangan negara, seperti tugas bank indonesia yang tercantum dalam uu nomor 3 tahun 2004 pasal 7 ayat 1 dan 2

(3)Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

(4)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.”

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihsan Mufia Siregar

NIM : 1640200160

Program Studi : Ekonomi Syariah

Perguruan Tinggi : IAIN Padangsidempuan

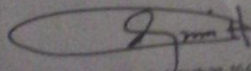
atas nama pribadi/ketua kelompok* dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah dengan judul:

"Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Ekonomi"

adalah merupakan hasil karya saya/kami* sendiri yang belum pernah dipublikasikan secara keseluruhan maupun sebagian, dalam bentuk jurnal, *working paper* atau bentuk lain yang dipublikasikan secara umum. Karya ilmiah ini merupakan karya intelektual saya/kami* dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini oleh saya/kami* sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan.

Demikian pernyataan ini Saya buat secara benar dan bertanggung jawab.

Mengetahui,
Dosen Pengampu
Mata Kuliah Kebankesentralan
/Dekan Fakultas**


(Dr. Dedi Hidayat, M.Pd.)
NIP. 19700810200901015

Yang menyatakan,
Pemilik/Ketua Kelompok


NIM 1640200160

* Pilih salah satu
** Dosen Pengampu Mata Kuliah Kebankesentralan untuk Perguruan Tinggi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Bank Indonesia terkait Kebankesentralan. Dekan Fakultas untuk Perguruan Tinggi yang telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan lingkungan kampusnya namun belum menandatangani Nota Kesepahaman dengan Bank Indonesia terkait Kebankesentralan.

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Karya Tulis : Pengaruh Teknologi Terhadap ^{Pertumbuhan} ~~Pertumbuhan~~ Ekonomi
2. Perguruan Tinggi : IAIN Padangsidimpuan
3. Penulis/Ketua Kelompok
 - a. Nama Lengkap : Ihsan Mulia Siregar
 - b. NIM : 1640200160
 - c. Program Studi : Ekonomi Syariah
 - d. Alamat Rumah : Jl. Imambonjol Gg. Teladan Aektampang
 - e. No Tel/HP : 082370427875
 - f. Alamat email : ibsanmulia18@gmail.com
4. Penulis/Anggota Kelompok
 - a. Nama Lengkap : Indra saputra
 - b. NIM : 1640200094
 - c. Program Studi : Ekonomi Syariah
5. Penulis/Anggota Kelompok
 - a. Nama Lengkap :
 - b. NIM :
 - c. Program Studi :

Dosen Pengampu
Mata Kuliah Kebanksentralan
/Dekan Fakultas

(Dr. Danar Jalaran, S.Si.)
NIP. 19 780615200401 1016

Menyetujui,

sidimpuan, 30 oktober 2018

Penulis/Ketua Kelompok

(Ihsan Mulia Siregar)
NIM. 1640200160

* Dosen Pengampu Mata Kuliah Kebanksentralan untuk Perguruan Tinggi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Bank Indonesia terkait Keloknentralan, Dekan Fakultas untuk Perguruan Tinggi yang telah mendirikan sarana BI Corner di lingkungan kampusnya namun belum menandatangani Nota Kesepahaman dengan Bank Indonesia terkait Kebanksentralan.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

STUDENT ID CARD



1640200160
IHSAN MULIA SIREGAR
FEBi-Ekonomi Syariah

EXP. Date: **31-08-2023**

AUTHORIZED SIGNATURE: 
 NOT VALID UNLESS SIGNED: 

VISI

Mengjadi institusi pendidikan Islam yang integratif dan berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan keilmuan, keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal yang interkoneksi.

MISI

1. Meningkatkan kualitas dan pengajaran ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora yang integratif dan unggul.
2. Mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora dengan pendekatan interkoneksi.
3. Mengembangkan nilai-nilai keislaman dan budaya Islam dalam memberikan keteladanan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Membangun sistem manajemen perguruan tinggi dengan tata kelola yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel.
5. Membangun transformasi terencana menuju Universitas Islam Negeri tahun 2024.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 Jl. T. Riza Nurdin Km. 4,5 Sibolang 22733
 Telp (0634) 22080 Fax (0634) 24022
www.iain-padangsidimpuan.ac.id



